

SKRIPSI
STRATEGI CALON TUNGGAL DALAM PILKADA
(STUDI KASUS: ADNAN-KIO DALAM PILKADA KABUPATEN GOWA
TAHUN 2020)



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik*

Oleh :

ROIDA HALILAH FALIH ICHSAN

E041181023

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**STRATEGI CALON TUNGGAL DALAM PILKADA (STUDI KASUS:
ADNAN-KIO DALAM PILKADA KABUPATEN GOWA TAHUN 2020)**

Disusun dan Diajukan Oleh :

ROIDA HALILAH FALIH ICHSAN

E041181023

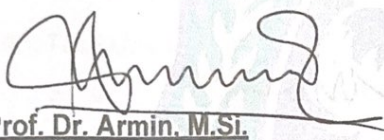
Dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal : 12 Mei 2023

Menyetujui,

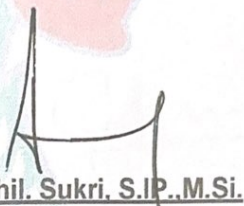
Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Armin, M.Si.

NIP. 19651109 19103 1008



Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.

NIP. 19750818 20801 1008

Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.

NIP. 19621231 199003 1023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**STRATEGI CALON TUNGGAL DALAM PILKADA (STUDI KASUS:
ADNAN-KIO DALAM PILKADA KABUPATEN GOWA TAHUN 2020)**

Disusun dan Diajukan Oleh :

ROIDA HALILAH FALIH ICHSAN

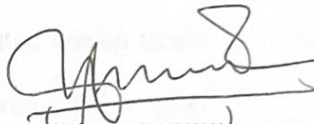
E041181329

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi
pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

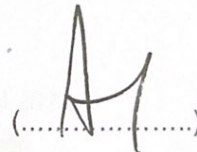
PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Armin, M.Si.



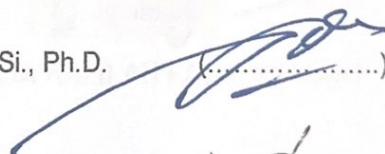
(.....)

Sekretaris : Dr. Phil. Sukri, SIP.,M.Si..




(.....)

Anggota : Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.



(.....)

Anggota : Dr. Muh. Imran, S.IP, M.Si



(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROIDA HALILAH FALIH ICHSAN

NIM : E041181023

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Strategi Calon Tunggal Dalam Pilkada (Studi Kasus: Adnan-Kio Dalam Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2020)*" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilantulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Mei 2023



(ROIDA HALILAH FALIH ICHSAN)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis hingga saat ini diberikan kesehatan serta dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam tak lupa penulis junjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya serta petunjuk kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta, yaitu Ibu **Novita Madonza Amu** dan Ayah penulis **Almarhum Ichsan Yasin Limpo** yang selalu memberikan dukungan sertairingan doa siang dan malam yang tiada henti – hentinya selalu terucap, terima kasih atas didikannya selama ini, sehingga menjadi alasan utama skripsi ini bisa dan harus diselesaikan. Kepada kakak dan adik tercinta **Sadli Nurjaffia, Adnan Purichta, Muh. Huzan Nabhan, Priska Paramita dan Emma Ainun Nidzma** yang tidak pernah putus memberikan keceriaan, doa, serta dukungan baik secara moril maupun material, beserta seluruh keluarga besar yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu, terima kasih semua atas dorongan, motivasi, perhatian, dukungan, dan doa di saat susah dan senang kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan

berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini, maka dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Bapak Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan **Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.** selaku Ketua Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan serta bapak **Haryanto, S. IP, M.A** selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan.
3. **Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si** selaku pembimbing I, yang telah memberi nasehat dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
4. **Bapak Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si** selaku penasehat pembimbing II, yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Ibu Dosen Prodi Ilmu Politik, **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Prof. Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D, Dr. Gustiana A. Kambo S.IP. M.Si., Dr. Ariana Yunus, S.IP M.Si, Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si, Haryanto, S.IP, M.A, Andi Ali Armunanto, S.IP. M.Si., A.Naharuddin S.IP, M.Si., Dr. Muhammad Saad, MA., Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si, Sakinah Nadir S.IP, M.Si., Endang Sari, S.IP, M.Si, Dr. Muhammad Saad, M.A, Ummi**

Suci Fathia, S.IP, M.Si, Muh. Imran, S.IP, M.Si, Dian Ekawaty, S.IP.M.Si

Terima Kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini, semoga penulis dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin.

6. Seluruh Staf Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan khususnya prodi Ilmu Politik (**Ibu Ija, Ibu Muli, Pak Nadir, Ibu Musriati, Bapak Hamsah dan Pak Samsuddin**), serta staf di Lingkup FISIP UNHAS tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
7. Terima kasih kepada para informan khususnya **Bapak Adnan Purichta** selaku Bupati Kabupaten Gowa dan **Bapak Abdul Rauf Malaganni (Kr. Kio)** selaku Wakil Bupati Kabupaten Gowa serta Ketua Partai yang mendukung Adnan-Kio yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan untuk menunjang skripsi ini, memberikan banyak bantuan dan kemudahan kepada penulis.
8. Seluruh teman-teman Ilmu Politik Angkatan 2018 (**Revolusi 2018**) yang telah kebersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.
9. Saudara-saudari terbaik sepanjang perkuliahan, **ORMADO (Tarjo, Nabeng, Shinta, Kak Sofi, Sasa, Fira, Jihan, Novi), Moris, Anggy, Amirah, dan Auliya** yang selalu bersama dengan penulis dan memberikan dukungan kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat penulis, **BEGUMI (Vira, Husnul, Nunu, Tasya, Manda, Dinda, Nadia, dan Nuriah)** yang selama ini memberikan

semangat, dukungan, motivasi dan doa kepada penulis.

Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih yang sebesar – besarnya atas bantuan dan doanya. Semoga bantuan dan keikhlasan mendapatkan balasan dari Allah SWT. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 03 Mei 2023

Roida Halilah Falih Ichsan

ABSTRAK

Roidah Halilah Falih Ichsan. NIM E041181023. Strategi Calon Tunggal Dalam Pilkada (Studi Kasus: Adnan-Kio Dalam Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2020. Di bawah bimbingan bapak Armin Arsyad. Dan bapak Sukri Tamma.

Pemilihan Kepala daerah pada tahun 2020 yang diselenggarakan secara serentak memiliki warna dalam prosesnya, termasuk di Kabupaten Gowa. Pasangan petahana Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf menjadi pasangan calon tunggal melawan kotak kosong di Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Gowa 2020. Pasangan ini diusung Sembilan partai politik yakni Partai PDI-P, PKB, Partai Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PAN, Demokrat dan Perindo. Dan berhasil memenangkan Pilkada Kabupaten Gowa dengan meraup suara di atas 90% dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Fenomena calon tunggal ini bukan hal yang baru dalam perpolitikan di Indonesia. Namun di Kabupaten Gowa kemunculan kotak kosong dan kemenangan calon tunggal besar serta tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi memperlihatkan kekuatan dan citra yang kuat dari pasangan Adnan-Kio. Kemunculan calon tunggal di kabupaten Gowa dapat dikaji dari proses pemberian rekomendasi partai. Kemunculan calon tunggal di kabupaten Gowa di pengaruhi oleh sosok dari pasangan Adnan-Kio di mata partai politik.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa pasangan Adnan-Kio dapat menjadi calon tunggal di pemilihan kepala daerah kabupaten Gowa serta untuk melihat bagaimana strategi yang diterapkan pasangan Adnan-Kio dalam memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah kabupaten Gowa. Penulis juga melakukan penelitian studi kasus dengan dasar penelitian kualitatif. Adapun teori dan konsep yang digunakan ialah teori strategi dalam hal ini menyangkut marketing politik, konsep kampanye politik serta strategi pemetaan politik Sun Tzu yang dipadukan dalam konsep pemilihan kepala daerah.

Dalam hasil penelitian ini menjelaskan faktor yang menyebabkan pasangan Adnan-Kio menjadi calon tunggal ialah karena elektabilitas pasangan Adnan-Kio yang tinggi. Berbanding lurus dengan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi pada pemerintahan Adnan-Kio di kabupaten Gowa. Selain kedua hal tersebut, faktor terbesar dari hal ini adalah resiko yang cukup tinggi di ambil oleh calon penantang jika melawan pasangan Adnan-Kio di Pemilihan kepala daerah kabupaten Gowa. Adapun strategi yang dilakukan oleh pasangan Adnan-Kio dalam memenangkan pemilihan kepala daerah yakni, turun langsung menemui masyarakat atau blusukan, mendekati tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh, memanfaatkan media dalam kampanye.

Kata kunci : Calon Tunggal, Kotak Kosong, Pemilihan Kepala Daerah, Kabupaten Gowa.

ABSTRACT

Roidah Halilah Falih Ichsan. NIM E041181023. Single Candidate Strategy in Pilkadda (Case Study: Adnan-Kio in the 2020 Gowa Regency Pilkada. Under the guidance of Mr. Armin Arsyad. And Mr. Sukri Tamma.

Regional head elections in 2020 which were held simultaneously have color in the process, including in Gowa Regency. The incumbent pair Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf became the single candidate pair against the empty column in the 2020 Gowa district head election. This pair was supported by nine political parties namely the PDI-P Party, PKB, Golkar Party, Nasdem, PKS, PPP, PAN, Democrat, and Perindo. And succeeded in winning the Gowa Regency Pilkada by gaining votes above 90% with a high turnout rate. This single-candidate phenomenon is not a new thing in Indonesian politics. However, in Gowa District, the appearance of an empty column and the victory of a single major candidate as well as the high level of public participation shows the strength and strong image of the Adnan-Kio pair. The problems of a single candidate in the Gowa district can be studied from the process of giving party recommendations. The problems of a single candidate in the Gowa district was influenced by the figure of the Adnan-Kio pair in the eyes of political parties.

This study aims to explain why the Adnan-Kio pair can become the sole candidate in the Gowa district head election and to see how the strategy adopted by the Adnan-Kio pair is in winning the Gowa district head election contestation. The author also conducts case study research based on qualitative research. The theories and concepts used are strategy theory in this case concerning political marketing, the concept of political campaigns, and Sun Tzu's political mapping strategy which are integrated into the concept of regional head elections.

The results of this study explain that the factor that caused the Adnan-Kio pair to become the only candidate was due to the high electability of the Adnan-Kio pair. Directly proportional to the high level of community satisfaction in the Adnan-Kio government in the Gowa district. Apart from these two things, the biggest factor in this is the relatively high risk taken by the potential challenger if he fights against the Adnan-Kio pair in the Gowa district regional head election. The strategy adopted by the Adnan-Kio pair in winning the regional head election, namely, going directly to the community or blusukan, approaching community leaders who have influence, and utilizing the media in campaigns.

Keywords: Single Candidate, Blank Column, Regional Head Election, Gowa Regency.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENERIMAAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah	6
1. 3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2. 1 Konsep Strategi	8
2.2 Konsep Marketing Politik	17
2.2.1 Pengertian Marketing Politik	17

2.2.2 Proses Marketing Politik	19
2.3 Kampanye Politik	22
2.4 Strategi Pemetaan Politik Sun Tzu	25
2.5 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	27
2.5.1 Pengertian Pilkada	27
2.6 Kerangka Pemikiran	37
2.7 Skema Kerangka Pemikiran	39
BAB III	40
METODE PENELITIAN	40
3.1 Lokasi Penelitian	40
3.2 Tipe dan Dasar Penelitian	40
3.3 Sumber Data	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data	42
3.5 Teknik Penetapan Informan	43
3.6 Fokus Penelitian	44
3.7 Teknik Analisis Data	47
BAB IV	50
DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	50
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Gowa	50
4.2 Kependudukan Kabupaten Gowa	52

4.2.1 Sebaran Penduduk Gowa	52
4.3 Visi Dan Misi Kabupaten Gowa	54
4.4 Biodata Pasangan Calon Tunggal	55
4.4.1 Bupati Gowa	55
4.4.2 Wakil Bupati Gowa	56
BAB V	58
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
5.1. Faktor yang Menyebabkan Pasangan Adnan-Kio Menjadi Calon Tunggal dalam Pilkada Kab. Gowa Tahun 2020.....	59
5.1.1. Elektabilitas Pasangan Adnan-Kio yang Tinggi.....	60
5.1.2. Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Adnan-Kio....	65
5.1.3. Pertimbangan Resiko yang Diambil Oleh Calon Penantang Incumbent.....	71
5.2. Strategi Pemenangan Pasangan Adnan-Kio dalam Memenangkan Pilkada Kab. Gowa Tahun 2020.	74
5.2.1. Turun langsung di Masyarakat (Blusukan).	76
5.2.2. Mendekati Tokoh Masyarakt.	83
5.2.3. Memanfaatkan Media dalam Kampanye.	86
BAB VI	90
PENUTUP.....	90

6.1 Kesimpulan.....	90
6.2 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) menunjukkan adanya kualitas demokrasi di Indonesia. Pemilihan kepala daerah telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih calon-calon kepala daerah (gubernur, bupati, walikota dan wakilnya) yang dikehendakinya secara langsung tanpa diwakili oleh DPRD. Sistem pemilihan yang dilakukan secara langsung dengan mengumpulkan suara terbanyak seperti ini yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat yang berpartisipasi dalam politik. Partisipasi masyarakat dalam menyalurkan suara politiknya akan menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Sistem pemilihan kepala daerah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 62 tentang ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dengan undang-undang. Pemilihan kepala daerah bersifat langsung dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan yang di atur penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Beberapa tahapan dalam pemilu meliputi pencalonan kandidat ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), kemudian seleksi berkas, pengundian nomor kandidat yang lolos seleksi, penentuan jadwal kampanye, oleh masing-masing kandidat, kemudian pelaksanaan

pemilihan serta yang terakhir adalah pengumuman resmi oleh KPU/KPUD terhadap kandidat yang dinyatakan menang dalam sebuah pemilihan.

Tahapan kampanye menjadi tahapan paling penting untuk setiap kandidat untuk memengaruhi masyarakat agar memilih kandidat tersebut. Kampanye adalah sebuah kegiatan untuk menarik simpati dan meningkatkan elektabilitas serta popularitas. Peningkatan elektabilitas dan popularitas sangat berpengaruh besar terhadap perolehan suara¹. Pemilihan kepala daerah juga sebagai media masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya. Setiap calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah pasti memiliki tujuan untuk memenangkan pemilihan yang diikuti. Untuk memenangkan persaingan tersebut, semua kandidat tentunya memiliki strategi yang digunakan untuk memenangkan pemilihan tersebut. Strategi politik merupakan segala rencana dan tindakan untuk memperoleh kemenangan dan meraih kursi dalam pemilu.²

Dalam menghadapi pemilu seperti pemilihan Bupati banyak faktor yang harus menjadi fokus para kandidat peserta pemilihan Bupati ini, diantaranya adalah menciptakan kekuatan politik. Kekuatan politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada.

¹ Dio Baleri, Skripsi: "Strategi Pemenangan Herman Hn-Yusuf Kohar dalam Pemilihan Walikota-Wakil Walikota Bandar Lampung Periode 2016-2021" (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), hal. 3.

² Suaib Napir, "Strategi Pemenangan Fahmi Massiara-Lukman dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Majene", *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*. Vol. 2 No 2, 2016, hal. 150.

Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas kekuatan politik. Keberhasilan dalam membentuk kekuatan politik dapat dilihat dari kemampuan aktor tersebut melaksanakan fungsinya. Aktor politik hadir ditengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi yang dianut. Cara yang digunakan oleh aktor politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum. Untuk eksis dalam sistem politik, aktor politik harus bersaing dalam pemilihan umum untuk memperoleh suara dari masyarakat dan mendapat kekuasaan.³

Strategi politik saat ini digunakan untuk memenangkan kandidat tertentu dalam pesta demokrasi baik ditingkat pusat maupun daerah, mulai dari pemilu legislatif, pemilihan presiden, kepada daerah bahkan yang terkecil adalah pemilihan kepala desa. Tujuan akhir dari strategi politik adalah membentuk dan menanamkan harapan, sikap, keyakinan, orientasi dan perilaku pemilih, yang dimaksudkan mendukung kandidat tertentu.

Pemilihan Kepala daerah pada tahun 2020 yang diselenggarakan secara serentak memiliki warna dalam prosesnya, termasuk di Kabupaten Gowa. Pasangan petahana Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf menjadi pasangan calon tunggal melawan kotak kosong di Pilkada Gowa 2020. Adnan yang merupakan anak dari almarhum mantan Bupati Gowa dua

³ Imam Mujahidi Fahmid, *Identitas Dalam Kekuasaan*, (Makassar : Ininnawa 2012).h.28

periode, IYL yang tak lain adik kandung Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Pasangan ini diusung Sembilan partai politik yakni Partai PDI-P, PKB, Partai Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PAN, Demokrat dan Perindo. Perolehan Suara Adnan-Kio perlu diapresiasi karena dalam pilkada partisipasi pemilih tertinggi di Kabupaten Gowa. Hal itu menjadi sejarah dalam pilkada Gowa meskipun dengan kondisi Pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia tanpa terkecuali termasuk Indonesia. Selain itu hasil yang diperoleh pada pilkada mampu memecahkan rekor dukungan tertinggi sepanjang pilkada di Sulawesi Selatan. Meskipun pada tahun 2013 Kabupaten Bantaeng mampu meraih tertinggi tetapi jika dilihat dengan jumlah pemilih Gowa masih berada di atas. Tidak berhenti pada kondisi tersebut, rekor yang diraih paslon ini juga tertinggi dalam melawan kotak kosong pilkada 2020. Terbukti ada 25 Kabupaten/Kota di Indonesia yang melawan kotak kosong pada pilkada 2020 ini, Kabupaten Gowa berhasil meraih tingkat dukungan tertinggi dengan capaian 90,91 persen⁴.

Hasil perhitungan itu juga sekaligus mampu memecahkan rekor dukungan tertinggi sepanjang pilkada di Sulawesi Selatan. Sebagai pendulang suara tertinggi, Adnan Purichta Ichsan mematahkan rekor kemenangan Nurdin Abdullah saat memenangi Pilkada Bantaeng 2013 lalu. Kala itu, Nurdin yang maju di periode keduanya bersama M Yasin meraih kemenangan sebanyak 82,58 persen atau 76.660 suara.

⁴ Diakses pada laman <https://makassar.sindonews.com/read/262602/713/isi-denny-ja-sebut-adnan-kio-pecahkan-berbagai-rekor-di-pilkada-gowa-2020-1607519535>. Pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 13.54 Wita.

Untuk partisipasi pemilih, warga Kabupaten Gowa yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menyalurkan hak suaranya tercatat paling tinggi diantara 12 pilkada kab/kota serentak se-Sulsel tahun 2020. Yakni menembus angka 79,17 persen. Angka ini melampaui target KPU sebesar 77,5 persen yang berlaku secara nasional, terlebih di tengah pandemi Covid-19. Sebagai perbandingan pada pilkada tahun 2015 lalu di Kab. Gowa partisipasi pemilih hanya sekitar 66 persen dengan lima pasangan calon. Namun kondisi pandemi covid-19 dan cuaca saat pilkada Tahun 2020 tak mengurangi partisipasi pemilih untuk memberikan suara.

Fenomena kotak kosong dalam pilkada tidak semuanya kemudian dimenangkan oleh kandidat dimana pada Pilkada Kota Makassar tahun 2018 yang justru dimenangkan oleh kotak kosong. Pilkada diikuti calon tunggal yakni pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi (appicicu). Barulah pada Pilkada serentak 2018, kotak kosong menang melawan pasangan calon tunggal. Kemenangan kotak kosong telah menjadi catatan sejarah dalam pemilu Indonesia, di mana pasangan calon tunggal kalah melawan kotak kosong untuk pertama kalinya. Kejutan kemenangan kotak kosong pada Pilkada bercalon tunggal di Kota Makassar dalam beberapa analisis media mengindikasikan bahwa pada kelompok pemilih mulai mampu melakukan konsolidasi diri untuk melawan oligarki elite partai politik yang memaksakan tidak menyepelkan aspirasi dan kehendak politik rakyat. Kemenangan kotak kosong melawan satu pasangan calon tunggal dalam pemilihan umum merupakan fenomena

sejarah dan merupakan yang pertama dan satu-satunya sampai saat ini di Indonesia.

Dengan adanya fenomena tersebut, penulis berupaya untuk mengkaji lebih dalam mengenai keberhasilan pasangan calon Bupati-Wakil Bupati (Adnan-Kio) dalam memenangkan Pilkada Gowa tahun 2020 melawan kotak kosong dengan menarik judul penelitian “**Strategi Calon Tunggal dalam Pilkada (Studi Kasus: Adnan-Kio dalam Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2020)**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa pasangan Adnan-Kio menjadi calon tunggal dalam Pilkada Kab. Gowa tahun 2020?
2. Bagaimana strategi pemenangan pasangan Adnan-Kio yang dilakukan sebagai calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Gowa tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan pasangan Adnan-Kio menjadi calon tunggal dalam Pilkada Kab. Gowa tahun 2020.
2. Untuk menganalisis strategi pemenangan pasangan Adnan-Kio yang dilakukan sebagai calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Gowa tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan dan informasi mengenai peranan Strategi dan Kekuatan politik di Kabupaten Gowa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk bagi calon bupati yang lain untuk memanfaatkan strategi dan kekuatan politik yang ada untuk memenangkan pilkada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sehubungan pembahasan sebelumnya bab II ini membahas lebih jelas dari aspek teoritis. Secara konseptual akan dijelaskan beberapa yang memiliki hubungan dengan pokok bahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

2.1 Konsep Strategi

Strategi adalah ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau kiat muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan⁵. Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu.⁶ Jadi, strategi politik adalah ilmu tentang teknik, taktik, cara, kiat yang dikelola oleh politisi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan, merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai yang diinginkan.

Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru dalam administrasi pemerintah atau dijalankannya program deregulasi, privatisasi atau desentralisasi.⁷ Tanpa strategi politik perubahan jangka panjang atau proyek-proyek besar sama sekali tidak dapat diwujudkan. Politisi yang baik berusaha merealisasikan

⁵Tim Prima Pena, Kamus Ilmia Populer (Surabaya : Gitamedia Press, 2006), hal 448

⁶ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta : PT . Gramedia Widusuarana, 1992), hal 10.

⁷ Peter Scrooder, Strategi Politik (Jakarta: FNS,2009), hal 5-6.

rencana yang ambisius tanpa strategi, seringkali menjadi pihak yang harus bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi sosial yang menyebabkan jutaan manusia menderita. Dalam strategi politik sangat penting mengenal strategi komunikasi. Strategi komunikasi sangat penting sehingga membawa keuntungan yang jelas bagi seseorang, atau yang selama ini diabaikan oleh lawan. Citra yang diinginkan (target image) antara lain: dalam proses implementasi, kelemahan pemerintah dan satuan eksekutif terutama sekali terletak di bidang kehumasan, target image menetapkan landasan bagi pekerjaan kehumasan, dan semua tindakan kehumasan hanya bertujuan untuk menyebarkan citra ini dan menanamkan dalam benak kelompok sasaran–sasaran. Citra yang diinginkan terkait dengan pilihan tema, Gaya, Cara konfrontasi dan tawaran sumber daya manusia⁸.

Sistematika 10 langkah strategi politik yaitu:⁹

a. Merumuskan Misi

Perumusan menjabarkan hal apa saja yang perlu direncanakan secara strategi. Hal ini harus mencakup tiga elemen yakni tujuan secara keseluruhan yang menguraikan posisi yang ingin kita capai melalui perencanaan strategi tersebut, alasan pentingnya pencapaian tujuan secara keseluruhan dan kerangka waktu (kurun waktu) dimana keseluruhan tujuan harus dicapai. Dalam sebuah strategi politik, misi dapat diartikan persetujuan atas suatu posisi tertentu, partisipasi dalam suatu tugas

⁸ Rainer Adam ,”Polical Markketing : Strategi Membangun Konstituen Dengan Pendekatan PR”, (Surakarta: Sebelas Maret University Press) hal 4-8

⁹ Peter Scrooder, Strategi Politik (Jakarta: FNS,2009), hal 24-40.

tertentu, dipilih sebagai kandidat. Dalam sebuah perencanaan karir politik, misi harus menyatakan untuk siapa strategi itu direncanakan. Dengan demikian misi dapat menetapkan suatu kerangka atau batasan. Misi harus mengidentifikasi jangka waktu, hingga kapan keseluruhan sasaran harus dicapai, dan misi tidak boleh dirumuskan secara terlalu optimis sehingga menjadi tidak realitis.

b. Penilaian Situasional dan Evaluasi

Analisa situasi dan evaluasi membahas fakta-fakta yang dikumpulkan, yang dikelompokkan ke dalam kekuatan dan kelemahan serta perkiraan kemungkinan keberhasilan yang terealisasi.

1) Pengumpulan Fakta

Pengumpulan fakta berarti pengumpulan fakta-fakta internal dan eksternal yang relevan. Fakta internal adalah fakta yang menyangkut organisasi sendiri. Fakta eksternal adalah fakta yang menyangkut para pekerja atau lingkungan di mana akan direalisasikan. Pembatasan antara fakta internal dan eksternal tidak terlalu mudah, tapi pembatasan dilakukan sebelum proses pengumpulan fakta dimulai, untuk menghindari munculnya kesalahpahaman. Fakta kompetitor atau pesaing adalah fakta yang berasal dari organisasi-organisasi, yang merupakan pesaing langsung dari organisasi kita sendiri. Fakta lingkungan adalah fakta yang berasal dari masyarakat yang akan dijalankan.

2) Mengidentifikasi Kekuatan dan Kelemahan

Fakta-fakta telah terkumpul, secara sistematis digolongkan dan ditimbang berdasarkan kadar relevansi, ukuran, kepentingan dan urgensi. Setiap fakta diteliti untuk menentukan apakah fakta-fakta tersebut mendukung atau justru mengganggu pelaksanaan. Apabila sebuah fakta mendukung, fakta ini menjadi kekuatan. Sebaliknya, apabila mengganggu pelaksanaan, ia akan menjadi kelemahan.

3) Analisa Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan dan kelemahan sudah diketahui, maka keduanya harus dievaluasi. Setelah mengelompokkan mereka berdasarkan kadar kepentingan, perlu untuk menetapkan apakah kita memiliki pengaruh terhadap kelemahan-kelemahan tersebut dalam arti dapat mengeliminir atau setidaknya mengurangnya. Dalam menganalisa dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kita, yang diperhadapkan dengan pesaing atau lawan dalam konteks perencanaan strategi politik dan mengamati lingkungan eksternal.

4) Umpan-Balik (Feedback)

Setelah menganalisa kekuatan dan kelemahan, langkah berikutnya adalah menentukan apakah dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Apabila analisa kekuatan dan kelemahan menunjukkan bahwa ada keuntungan strategis yang jelas sehingga kemenangan pasti dapat diperoleh, dan

kelemahan cukup dapat dilindungi, maka tersebut memiliki kemungkinan untuk dapat dicapai.

c. Perumusan Sub-Strategi

Sementara langkah penilaian situasional lebih menyibukkan diri dengan keadaan dan situasi masa lalu, fokus kita harus bergerak maju ke depan untuk perumusan sub-strategi. Langkah-langkahnya sebagai berikut menyusun tugas-tugas, merumuskan strategi dan mengevaluasi strategi. Apabila penilaian situasional sudah selesai, menjadi jelas sesuatu yang telah dirumuskan akan dijalankan atau masih perlu direvisi.

1) Menyusun Tugas-Tugas

Berdasarkan analisa kekuatan dan kelemahan, lahirlah tugas-tugas yang harus diselesaikan. Tugas-tugas tersebut adalah meneliti kelemahan kita yang harus dieliminir, memberikan pertahanan dengan cara menutupi, mengalihkan perhatian yang harus dibangun, setelah itu menelaah kekuatan kita untuk menyerang lawan dan jika lawan menunjukkan kelemahan yang tidak berhubungan dengan kekuatan kita, maka kita harus membangun kekuatan ini.

2) Merumuskan Strategi

Pertama-tama harus memilih isu-isu yang diperhadapkan dengan pesaing atau lawan. Isu-isu ini hendaknya berupa isu atau argumen yang membawa keuntungan yang jelas. Lingkungan di mana sebuah isu dijalankan memainkan peranan yang penting

dalam penentuan isu dan memusatkan kekuatan serta semua penyerangan hanya satu isu dalam waktu tertentu saja.

3) Mengevaluasi Strategi

Masing-masing strategi yang dipilih untuk menyelesaikan tugas haruslah saling melengkapi. Mereka harus saling cocok, baik di tingkat sub-sub strategi maupun dalam strategi menyeluruh. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap strategi-strategi yang dipilih setelah strategi itu dirumuskan.

d. Perumusan Sasaran

Setelah sasaran diputuskan, tanggung jawab untuk memindahkan strategi ke unit-unit taktis, dan diimplementasikan melalui pembagian tugas. Strategi telah ditetapkan, maka pendekatan untuk memanfaatkan kekuatan terhadap kelemahan lawan dan untuk memecahkan kelemahan sendiri juga ditetapkan. Tujuan harus menggambarkan keadaan pada akhir sebuah proses dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ini harus dapat dicapai dan tidak boleh menjadi ilusi belaka. Tujuan sudah dirumuskan, masing-masing strategi harus direalisasikan dan dijalankan. Tujuan ini masing-masing harus dibagi ke dalam unit taktis yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan. Karena itu, kuantitas, kualitas, jangka waktu dan tanggung jawab harus ditetapkan setelah tujuan dirumuskan.

e. Target Image

Strategi untuk kegiatan kehumasan atau Public Relations (PR) dirumuskan dan diimplementasikan di tingkat “PR”, setelah keputusan mengenai “citra yang diinginkan” (target image) ditetapkan. Target image melukiskan citra yang diharapkan, yang hendak dicapai setelah dijalankannya rangkaian pekerjaan kehumasan yang panjang dalam kelompok target. Target image ditentukan oleh keputusan strategis mengenai perumusan tugas dan pilihan-pilihan yang berkaitan dengan isu, gaya, jenis konfrontasi dan orang-orang yang diperhitungkan.

f. Kelompok-kelompok Target

Kelompok target adalah kelompok-kelompok masyarakat atau organisasi mereka yang penting untuk pencapaian misi. Kelompok ini perlu didekati dalam waktu yang telah ditetapkan. Kelompok ini diidentifikasi dengan menginterpretasikan keputusan strategis, khususnya tujuan taktis, dan melalui analisa citra yang diinginkan (target image). Apabila kelompok target telah didefinisikan, fonsai untuk implementasi strategi yang komunikatif ditetapkan. Fondasi ini dilengkapi dengan pesan kelompok target dan instrumen-instrumen kunci.

g. Pesan Kelompok Target

Kelompok target yang telah dibahas diatas membutuhkan informasi-informasi tertentu berdasarkan keputusan strategis yang telah diambil

sebelumnya untuk memungkinkan bereaksi sesuai dengan apa yang telah direncanakan secara strategis. Informasi ini dapat dikomunikasikan secara khusus dengan masing-masing kelompok target, dan tidak untuk semua kelompok target yang ada. Perlu diperhatikan bahwa pesan yang diterima masing-masing kelompok target tidak boleh saling bertentangan. Perluasan pesan kelompok target merupakan instrumen yang kerap digunakan pada tahap akhir masa kampanye, untuk memberikan janji tertentu kepada kelompok pemilih tertentu.

h. Instrumen-instrumen Strategi

Pemilihan instrumen kunci terutama berkaitan dengan aksi-aksi dan alat komunikasi yang akan digunakan. Instrumen-instrumen dan aksi ini disesuaikan secara khusus bagi kelompok target. Untuk itu ada syarat bahwa kelompok yang dijadikan kelompok target telah dikenali terlebih dahulu, karena setiap kelompok target hanya diraih melalui pendekatan atau komunikasi tertentu. Pemilihan instrumen-instrumen kunci yang akan digunakan sekaligus menghasilkan keputusan-keputusan penting yang berhubungan dengan sumber daya untuk mengimplementasikan strategi serta efektivitas kampanye. Keputusan ini, beserta kelompok target yang dipilih menjadi prasyarat keberhasilan pelaksanaan strategi.

i. Implementasi Strategi

Dalam pengimplementasikan strategi, faktor manusia dan faktor operasional perlu diperhitungkan. Sebelum implementasi

strategi dilakukan terlebih dahulu perlu diambil keputusan mengenai tujuan taktis, perumusan citra yang diinginkan, identifikasi kelompok target, pesan kelompok target dan instrumen kunci. Setelah itu baru lah peraturan untuk implementasi strategi perlu ditetapkan. Dalam mengimplementasikan strategi politik, faktor manusia menjadi signifikan untuk tiga aspek yaitu pimpinan politik, pimpinan partai yang bekerja penuh dan anggota partai yang bekerja paruh waktu atau sukarelawan. Hubungan antara ketiga pihak ini, kuantitas, pendidikan, motivasi dan etika merupakan syarat awal bagi keberhasilan implementasi strategi. Sementara dalam bidang operasional, syarat awal untuk keberhasilannya tergantung pada prinsip-prinsip kecepatan, penyesuaian diri dan tipu daya.

j. Pengendalian Strategi

Pengendalian strategi terdiri dari dua elemen yang menentukan keberhasilan penerapan suatu strategi. Elemen yang pertama adalah prinsip pengumpulan data intelijen dan perolehan informasi. Elemen yang kedua adalah prinsip perlindungan informasi di pihak sendiri. Setelah itu dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT, yakni Strength, Weakness, Opportunities, Threats yang berarti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sementara SWOT membatasi diri pada penilaian situasi dan perumusan strategi yang

bergerak lebih jauh pada evaluasi strategi dan terutama pelaksanaannya.¹⁰

2.2 Konsep Marketing Politik

Ilmu marketing biasanya dikenal sebagai sebuah disiplin yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Hubungan dalam marketing tidak hanya terjadi satu arah, melainkan dua arah sekaligus dan simultan. Produsen perlu memperkenalkan dan membawa produk serta jasa yang dihasilkan kepada konsumen. Semua usaha marketing dimaksudkan untuk meyakinkan konsumen bahwa produknya memang memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan produk yang diujakan pesaing. Metode dan pendekatan yang terdapat dalam ilmu marketing dapat membantu institusi politik untuk membawa produk politik kepada konstituen dan masyarakat secara luas, dan meyakinkan produk politiknya lebih unggul dibandingkan dengan pesaing.

2.2.1 Pengertian Marketing Politik

Menurut Nursal, *political marketing* ialah serangkaian aktivitas terencana, strategis tapi juga taktis, berdimensi jangka panjang dan jangka pendek, untuk menyebarkan makna politik kepada pemilih. Sementara itu, hal yang ditekankan dalam *political marketing* adalah penggunaan pendekatan dan metode marketing untuk membantu politikus

¹⁰ Peter Scrooder, Strategi Politik (Jakarta: FNS,2009), hal 11-13.

ataupun partai politik agar lebih efisien serta efektif dalam membangun hubungan dua arah dengan konstituen dan masyarakat.¹¹

Penggunaan marketing dalam dunia politik dikenal sebagai marketing politik (*political marketing*). Dalam marketing politik, yang ditekankan adalah penggunaan pendekatan marketing untuk membantu politikus dan partai politik agar lebih efisien dan efektif dalam membangun hubungan dua arah dengan konstituen dan masyarakat. Hubungan ini diartikan sangat luas, dari kontak fisik selama kampanye sampai dengan komunikasi tidak langsung melalui pemberitaan di media massa.¹²

Konsep marketing politik mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan didalam dunia politik dengan tujuan agar dapat mengembalikan dunia politik kepada tujuan semula yaitu menyerap dan mengapresiasi pendapat masyarakat. *Marketing* politik bukanlah konsep untuk menjual partai politik, namun sebuah konsep yang menawarkan bagaimana sebuah partai politik atau kontestan bisa membuat program yang berhubungan dengan permasalahan aktual. *Marketing* politik adalah konsep permanen yang harus dilakukan terus menerus oleh kandidat dalam membangun kepercayaan melalui proses jangka panjang.¹³

¹¹ Moh. Ali Andrias & Taufik Nurohman, *Partai Politik dan Pemilu (Analisis Marketing Politik dan Strategi Positioning Partai Politik Pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya)*, (Tasikmalaya: Universitas Siliwangi, 2013), hlm.354.

¹² Firmanzah, *Marketing Politik* (Jakarta : Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm.128.

¹³ Firmanzah, *Marketing Politik* (Jakarta : Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm.156.

2.2.2 Proses Marketing Politik

Proses penerapan marketing dalam dunia politik juga mengadopsi program 4P yang telah lama dikenal dalam dunia bisnis. Namun, 4P dalam politik mempunyai nuansa yang berbeda dengan yang telah diterapkan di dalam dunia usaha dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan program 4P dalam politik bertujuan untuk membantu partai politik mulai dari menganalisis dinamika masyarakat, memformulasikan program kerja, hingga penerapan strategi pada kelompok-kelompok masyarakat. Firmanzah menyebutkan bahwa program 4P terdiri dari Produk, Promosi, *Price* (Harga), dan *Place* (Tempat) yang dijelaskan pada uraian di bawah ini :

a. Produk

Produk (*product*) yang ditawarkan institusi politik merupakan sesuatu yang kompleks, dimana pemilih akan menikmatinya setelah sebuah partai atau seorang kandidat terpilih.¹⁴

Niffenger dalam Firmanzah membagi produk politik dalam tiga kategori yaitu :

1. Platform partai
2. *Past record* (catatan tentang hal-hal yang dilakukan di masa lampau)
3. *Personal characteristic* (ciri pribadi). Produk utama sebuah instruksi politik adalah platform partai yang berisikan konsep, identitas ideologi, dan program kerja sebuah institusi. Selain itu, apa yang telah dilakukan

¹⁴ Firmanzah, *Marketing Politik* (Jakarta : Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 200.

partai politik di masa lalu berkontribusi dalam pembentukan sebuah produk politik. Akhirnya, karakteristik atau ciri seorang pemimpin atau kandidat memberikan citra, simbol dan kredibilitas sebuah produk politik.

Sedangkan Butler dan Collins dalam Firmanzah menyatakan bahwa ada tiga dimensi penting yang harus dipahami dari sebuah produk politik yaitu :

1. pribadi/partai/ideologi
2. kesetiaan
3. bisa berubah-berubah

Seorang kandidat, partai politik dan ideologi partai adalah identitas sebuah instruksi politik yang ditawarkan ke pemilih. Para pemilih akan mempertimbangkan mana yang mewakili mereka. Loyalis pemilih adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh sebuah institusi politik. Kandidat perlu menjaga kepercayaan pemilih agar tetap memberikan suaranya. Produk- produk politik inilah yang merupakan modal utama kandidat yang harus dikembangkan dan dijaga agar masyarakat dapat memilih mereka sebagai wakil dari suara mereka.

b. Promosi

Sebagian besar literatur dalam *marketing* politik membahas cara sebuah institusi politik dalam melakukan promosi (*promotion*) ide, *platform* partai dan ideologi selama kampanye pemilu.¹⁵ Dalam

¹⁵ Firmanzah, *Marketing Politik* (Jakarta : Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm.203.

melakukan promosi produk yang mereka punya, partai politik biasanya menggunakan media massa. Media massa seperti televisi menjadi sarana yang paling tepat untuk mempromosikan produk politik karena hampir seluruh masyarakat Indonesia saat ini telah dapat mengakses segala program dan media lainnya yaitu adalah media sosial, media sosial pada masa ini sangatlah penting dimana hampir sebagian orang sering menggunakan media sosial, dan media sosial juga dapat diakses di seluruh Indonesia karena perkembangan teknologi yang sangat canggih.

Selain itu, promosi juga bisa dilakukan melalui pengarahannya dalam jumlah besar untuk menghadiri sebuah “Tabligh-Akbar” atau ‘Temu Kader’. Selain ingin tetap menjaga antara institusi politik dengan massanya, kesempatan macam ini akan diliput oleh media massa sehingga tidak bisa langsung dilihat sebagai media promosi.

c. Harga

Harga dalam marketing politik mencakup harga ekonomi , psikologis dan citra nasional. Harga ekonomi berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dalam serangkaian proses marketing politik. Kemudian harga psikologis mengacu pada harga persepsi psikologis, misalnya apakah pemilih merasa nyaman dengan latar belakang dari kandidat (etnis, agama, pendidikan dan lain-lain) dari seorang kandidat. Dan harga citra nasional yang dimaksud adalah mengarah pada

apakah pemilih merasa kandidat tersebut bisa memberikan citra positif pada suatu wilayah dan bisa menjadi kebanggaan bagi mereka.

d. Tempat

Tempat berkaitan erat dengan cara hadir dan distribusi pesan dari kandidat ke masyarakat sebagai pemilih. Partai politik dan kandidat mendistribusikan pesan dengan cara kunjungan ke daerah-daerah tertentu dan juga tempat-tempat seperti pasar tradisional.

2.3 Kampanye Politik

Peter Schoder dalam Roni Tabroni mengatakan bahwa “kita tidak mungkin disukai oleh semua orang”. Kampanye politik bukanlah situasi perang, tetapi kampanye politik merupakan suatu dimana setiap ide politik yang dikemukakan oleh seseorang atau sebuah kelompok akan memecah masyarakat pada saat ide itu diumumkan. Politik memang bukan perang. Tetapi efek dari situasi yang diciptakan oleh kampanye politik bisa berubah menjadi perang ketika kampanye politik dijadikan sebagai arena untuk membantai lawan politik tanpa efek dan sopan santun politik. Kampanye politik merupakan sebuah upaya untuk memengaruhi pemilih supaya menentukan pilihan sesuai dengan tujuan sang kandidat.¹⁶

Menurut Firmanzah mengatakan bahwa kampanye politik merupakan semua agenda partai atau perorangan yang berkaitan dengan pengumpulan massa, parade, orasi dengan pemaparan program kerja dan

¹⁶ Roni Tabroni, *Marketing Politik*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.38.

mempengaruhi opini publik, pemasangan atribut partai (misalnya umbul-umbul, poster, spanduk), dan pengiklanan partai lewat media cetak ataupun elektronik, dengan maksud untuk sosialisasi program kerja dan mempengaruhi opini publik. Secara singkat kampanye harus mulai dipahami dua, yakni kampanye jangka pendek dan jangka panjang. Karena publik tidak hanya melihat partai ataupun kontestan politik lainnya hari ini, tetapi juga masa lalu yang bisa dipastikan akan mempengaruhi elektabilitas partai di masa mendatang.¹⁷

Adapun kampanye di media massa merupakan perubahan sikap suatu masyarakat khususnya dalam konteks politik pada umumnya dipengaruhi oleh adanya informasi baru yang dipandang relevan dengan tuntutan kondisional, kapan dan dimana informasi baru itu diterima. Bersamaan dengan munculnya respon terhadap rangsangan informasi, secara bertahap dan disadari ataupun tidak disadari, perubahan itu mulai terjadi. Besar kecilnya perubahan, satu diantaranya bergantung pada kekuatan efek media yang menjadi salurannya.

Strategi kampanye politik adalah bentuk khusus dari strategi politik. Tujuannya yaitu untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara memperoleh hasil yang baik dalam pemilu, agar dapat mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah kepada perubahan masyarakat.¹⁸ Ada beberapa strategi kampanye politik yang

¹⁷ Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm.217

¹⁸ Peter Schoder, *Strategi Politik* (Jakarta :Friedrich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit, 2013), hlm.9.

dikemukakan oleh Firmanzah, yakni sebagai berikut :

a. Push-marketing

Dalam strategi ini, partai politik atau kandidat berusaha mendapatkan dukungan melalui stimulan yang diberikan kepada pemilih. Masyarakat perlu mendapatkan dorongan dan energi untuk pergi ke bilik suara dan mencoblos suatu kontestan. Di samping itu, perlu menyediakan sejumlah alasan yang rasional maupun emosional kepada para pemilih untuk bisa memotivasi mereka agar tergerak dan bersedia mendukung suatu kontestan.

b. Pass-marketing

Strategi ini menggunakan individu maupun kelompok yang dapat memengaruhi opini pemilih. Sukses tidaknya penggalangan masa akan sangat ditentukan oleh pemilihan para *influencer* ini. Semakin tepat *influencer* yang dipilih, efek yang diraih pun menjadi semakin besar dalam memengaruhi pendapat, keyakinan dan pikiran publik.

c. Pull-marketing

Strategi jenis ini menitikberatkan pada pembentukan image politik yang positif. Supaya simbol dan *image* politik dapat memiliki dampak yang signifikan, kedua hal tersebut harus mampu membangkitkan sentimen. Pemilih cenderung memilih partai atau kontestan yang memiliki arah yang sama dengan apa yang mereka rasakan.¹⁹

¹⁹ Firmanzah, *Marketing Politik*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm.218.

2.4 Strategi Pemetaan Politik Sun Tzu

Pemetaan politik bukanlah penggalian informasi atau isu-isu secara serampangan. Pemetaan politik juga bukan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh tim sukses atau pendukung. Banyak partai politik menentukan strategi dan program berdasarkan informasi yang tidak jelas asal usulnya dan metode penggaliannya. Misalnya, isu tentang kelompok masyarakat tertentu mendukung atau tidak mendukung, masyarakat membutuhkan program atau barang A dan lain sebagainya. Syukur bila informasi itu benar adanya, tetapi bila informasi itu salah, partai politik dan kandidat bisa masuk “jurang”. Selain akan terkuras energinya, partai politik bisa melakukan berbagai hal yang tidak produktif.

Peta politik adalah seperangkat informasi yang valid yang menggambarkan secara jelas menyangkut partai politik, kandidat, pesaing, masyarakat (pemilih), media komunikasi, dan berbagai isu strategis. Peta politik ini sangat penting dimiliki oleh setiap kontestan. Peta politik ini akan menuntun kontestan politik untuk menentukan jalan yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan politik. Ibarat seseorang yang akan menuju suatu tempat, bila ia membawa peta maka tidak akan tersesat dan bahkan bisa menentukan jalan mana dan kendaraan apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan secara cepat dan efisien. Dengan peta politik ini kontestan juga akan mengetahui berbagai kelemahan dan kekuatan diri sendiri dan pesaingnya. Dengan memiliki peta politik ini kontestan tidak akan terkecoh atau terpancing dengan

berbagai informasi atau isu yang menyesatkan. Kontestan tetap bisa fokus dengan target dan sasaran yang harus ditempuh dan mengabaikan hal-hal yang tidak terlalu penting.

Sun Tzu mengatakan, “Kenali diri sendiri, kenali lawan; maka kemenangan sudah pasti ada di tangan. Kenali medan pertempuran, kenali iklim; maka kemenangan akan sempurna”. Dengan kata lain, Sun Tzu mengatakan bahwa sebelum berangkat ke medan perang, langkah awal yang sangat penting yang harus dilakukan adalah melakukan pemetaan. Pemetaan yang menyangkut data-data tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri, lawan, medan pertempuran dan iklim yang bisa mempengaruhi jalannya pertempuran. Bila sudah mengenali kekuatan diri sendiri dan lawan, maka sudah separuh jalan memenangkan peperangan, dan apabila ditambah mengetahui medan pertempuran dan iklimnya, tentu akan memenangkan pertempuran dengan sempurna.

Berdasarkan filosofi Sun Tzu tersebut, dapat dibuat empat tipologi pemetaan politik, yaitu;

- 1) Pemetaan diri sendiri : kekuatan dan kelemahan diri sendiri,
- 2) Pemetaan lawan: kekuatan dan kelemahan lawan,
- 3) Pemetaan medan pertempuran: seluk beluk masyarakat (pemilih),
- 4) Pemetaan iklim: isu-isu yang sedang berkembang.

2.5 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

2.5.1 Pengertian Pilkada

Pilkada adalah pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara langsung dan demokratis. Pilkada berlandaskan pada semangat otonomi daerah setelah masa reformasi pada tahun 1998 dan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat, namun pilkada secara langsung baru terlaksana pada tahun 2005 mengingat mempersiapkan segala perangkat yang dibutuhkan terutama perundangan yang berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilihan di daerah seluruh Indonesia.²⁰

Pilkada adalah suatu sistem yang dimana tujuannya untuk mencari pemimpin daerah seperti halnya Gubernur, Bupati dan Walikota dalam pemilihan yang dilakukan secara langsung dan demokratis. Adapun yang menjadi dasar hukum ialah Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Menurut Asshiddiqie dalam Baleri menyatakan bahwa pilkada langsung merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di

²⁰ Rasniati. 2016. Strategi Pemenangan Pasangan Raden Adipati Sury dan Edward Antoni dalam Pemilukada Serentak 2015 di Way Kanan. Skripsi : Universitas Raden Intan. Diakses pada laman http://repository.radenintan.ac.id/1129/1/Skripsi_Rasniati.pdf. Pada tanggal 13 Februari 2022. Pukul 13.10 Wita.

daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama, karna sebagus apapun suatu negara yang ditata secara demokratis tidak akan dianggap benar-benar demokratis jika pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara itu demokratis atau tidak. Kemudian Suharizal dalam Baleri mengatakan bahwa pilkada merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan nasional dan internasional.

Mengingat esensi pilkada adalah pemilu, dimana secara prosedural dan substansi adalah manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan, maka pilkada sebagaimana pemilu lainnya layak mendapatkan pengaturan khusus sebagai derajat akuntabilitas dan kualitas demokrasinya terpenuhi dengan baik. Selanjutnya Prihatmoko dalam Baleri²¹ juga mengatakan bahwa pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Pilkada langsung dapat disebut pemilu apabila kedua prasyarat dasar tersebut diterjemahkan. dengan berbagai tahapan kegiatan dan penunjang kegiatan yang terbuka (transparan) dan

²¹ Dio Baleri, Skripsi: "Strategi Pemenangan Herman Hn-Yusuf Kohar dalam Pemilihan Walikota-Wakil Walikota Bandar Lampung Periode 2016-2021" (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017). hlm. 77

dapat dipertanggung jawabkan (accountabel).

Berdasarkan beberapa definisi tentang pilkada diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pilkada merupakan proses pemilihan secara langsung oleh rakyat untuk memilih pasangan calon yang akan menjadi pemimpin didaerahnya sesuai dengan keinginan dan kehendak dari rakyat tanpa ada paksaan dari manapun dan siapapun. Perubahan sistematika pilkada telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih calon-calon kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) yang dikehendaknya secara langsung tanpa diwakili oleh DPRD. Sistem pemilihan secara langsung seperti ini memerlukan upaya persuasif yang mempunyai tujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam demokrasi politik, karena partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak suara yang akan menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun kedepan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur juga pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara demokratis. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh KPUD. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara Pilkada memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Merekalah yang akan memandegani proses Pilkada, yang pada pemilihan legislatif dan presiden tahun lalu dilakukan oleh KPU, maka disinilah urgensinya untuk melakukan kajian, pemetaan dan evaluasi berbagai Pilkada yang telah dilakukan di berbagai daerah,

sebagai bahan untuk merumuskan desain perencanaan Pilkada di masa mendatang. Pilkada secara langsung dan serentak adalah salah satu terobosan politik yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal, karena Pilkada juga adalah bagian dari proses pendalaman dan penguatan demokrasi (*deepening and strengthening democracy*) serta upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang efektif. Karena Pilkada langsung pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan khususnya dalam hak politik.

Pada saat ini Pilkada tidak hanya diselenggarakan secara langsung tapi juga diselenggarakan secara serentak seperti yang telah disahkan dalam Undang-Undang yang telah mengalami beberapakali pembaruan dan dengan demikian yang menjadi aturan terbaru sebagai dasar penyelenggaraan pilkada serentak ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Dengan munculnya Pilkada serentak, dapat memberikan gambaran bahwa Pilkada langsung yang dilaksanakan sejak tahun 2005 itu mengalami penyempurnaan, penyempurnaannya ialah pilkada dilaksanakan secara langsung dan serentak.

Secara umum, pemilu merupakan proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berskala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh konstitusi. Dalam praktiknya, pemilu merupakan kegiatan politik suatu Negara dalam rangka mewujudkan demokrasi. Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala

dikarenakan oleh beberapa sebab. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu.

Dalam jangka tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan Negara. Kedua, disamping pendapat rakyat dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam Negara sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih baru (*new voters*) atau pemilih pemula, belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri, lagi pula, keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan Negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Individu yang benar-benar memiliki kekuatan otonom dalam masyarakat, biasanya akan sangat dicintai masyarakatnya, sehingga mereka tidak mau memilih pemimpin yang lain.

Karakter yang melekat seperti ini dapat kita temui pada diri Tri Rismaharini Walikota Surabaya, yang benar-benar bekerja untuk rakyatnya. Kecintaan rakyat kepadanya membuat gentar calon pesaing sehingga tidak ada yang berani untuk maju dalam pilkada

serentak tahun 2015. Walaupun akhirnya setelah perpanjangan masa pendaftaran tahap kedua akhirnya ada calon pesaing yang muncul. Hal ini terjadi karena mereka beranggapan akan sulit mengalahkan petahanan yang mempunyai tingkat elektabilitas yang tinggi seperti Tri Rismaharini.

Makna filosofis yang dapat dipelajari dari pilkada langsung adalah berkaitan dengan lahirnya individu yang memiliki hakikat sebagai kekuatan yang benar-benar otonom. Baik dalam konteks menggunakan hak pilihnya termasuk juga untuk mengambil pilihan dengan tidak menggunakan hak politiknya.²² Artinya keterkaitan yang sebenarnya terletak pada kedaulatan yang berada sepenuhnya ditangan rakyat. Sehingga kehadiran masyarakat benar-benar menjadi stakeholder utama dari proses politik dalam pilkada.

Calon tunggal lahir karena mahalny mahar dari partai pengusung. Maka secara rasional, jika ada calon petahana yang kuat, calon lain pasti akan berkalkulasi rasional. Daripada hilang segalanya, lebih baik mengurungkan niat untuk jadi calon. Karena untuk menjadi calon saja mereka sudah harus membayar mahar. Belum lagi dana yang akan digunakan untuk kampanye, dana untuk meraih suara pemilih, dana untuk mengamankan suara mulai dari tingkat TPS sampai mengamankan suara di KPU, KPU Kabupaten/ Kota, KPU Provinsi, KPU pusat bahkan sampai di tingkat MK jika terjadi sengketa.

Calon tunggal ini dapat juga lahir karena mesin partai yang

²² PT. Raja Grafindo Persada. Fadjar. 2010. Perkembangan & Kondolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta : Sinar Grafika Offset hlm 56

berfungsi untuk memberikan pendidikan politik bagi kader tidak berfungsi dengan baik. Karena partai selain wajib memberikan pendidikan politik kepada masyarakat juga wajib untuk memberikan pendidikan politik kepada kader-kadernya, termasuk dalam hal ini adalah dengan menyiapkan kader terbaik untuk menjadi pemimpin di daerah masing-masing serta menyiapkan kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin di kancah nasional.

Faktor lain yang juga dapat menyebabkan lahirnya calon tunggal adalah kriteria yang diatur dalam undang-undang mengenai syarat dukungan dari jalur parpol yang naik menjadi 30% dan syarat dukungan pencalonan perseorangan yang dinaikkan lebih dari 65%. Hal ini mungkin perlu ditinjau ulang karena masyarakat kita adalah masyarakat yang baru belajar berdemokrasi, sehingga belum siap untuk memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang, sehingga hal ini membuat parpol dan calon perseorangan sulit untuk maju sebagai calon dalam pilkada.

Berdasarkan hal tersebut, maka solusi hukum yang dapat ditawarkan untuk menghadapi calon tunggal adalah 1). Calon tunggal dilawankan dengan bumbung kosong, 2). Menunda pelaksanaan pilkada sampai dengan pilkada serentak tahun 2017, 3). Menerbitkan Perpu. UU No. 8 Tahun 2015 yang tidak memprediksi akan adanya calon tunggal dalam pendaftaran pilkada serentak Tahun 2018, tidak memenuhi angka 7 asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu peraturan perundang-undangan tidak boleh terus-menerus diubah, artinya

tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang kehilangan orientasi. Artinya bahwa cakupan materi sebuah undang-undang harus sangat luas, cakupan materinya harus bisa memprediksikan hal yang diatur di dalamnya masih bisa menjangkau dan mengikuti perkembangan masyarakat sampai puluhan tahun ke depan. Sehingga bisa memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat secara umum terutama pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan peraturan perundang-undangan itu. Untuk itu para pembuat peraturan perundang-undangan harus mempunyai kemampuan yang baik dan pengetahuan yang luas dalam bidangnya sehingga peraturan perundang-undangan itu dapat berumur panjang dan tidak harus diubah dalam hitungan bulan sejak keberlakuannya (seumur jagung).

Hal yang seperti ini lumrah sekali terjadi di Indonesia, terutama peraturan perundang-undangan yang “basah”, yang menyangkut bidang ekonomi dan politik. Hal-hal yang seperti ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dan jika hal-hal yang seperti ini terus-terusan terjadi dapat membuat masyarakat tidak percaya kepada hukum dan rentan terjadi anarki. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Amar putusan Mahkamah Konstitusi terkait calon tunggal adalah sebagai berikut.

Menyatakan Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak

memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menetapkan tentang calon Pemilu lebih dari dua pasangan calon. Jadi, siapa lawan paslon tunggal ini dalam pilkada nanti? Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, disebutkan bahwa pemilihan dengan satu pasang calon dapat dilaksanakan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Paslon tunggal tersebut akan melawan kotak kosong di kertas suara. Untuk bisa memenangkan pilkada, paslon tunggal itu harus meraih dukungan lebih dari 50 persen suara. Jika perolehan mereka di bawah 50 persen, maka dinyatakan kalah dan dapat mengikuti pilkada tahun berikutnya. Tak heran jika kini di beberapa daerah dengan paslon tunggal, sebagian masyarakat mulai mengadakan kampanye kotak kosong. Mereka memilih kotak kosong karena menganggap paslon tunggal ini tidak mampu memenuhi aspirasi mereka. Kampanye ini akhirnya dilakukan untuk mengimbangi kampanye paslon tunggal tersebut.

Mekanisme pencoblosan kotak kosong mengacu pada keputusan KPU No. 14 tahun 2015 dan keputusan KPU No. 144 Tahun 2016, bahwa pilkada dengan satu pasangan calon dilaksanakan dengan surat suara berdesain pasangan calon dan kotak kosong. Sementara itu untuk kriteria pemenang hal tersebut telah diatur pada pasal 22 dalam peraturan KPU No. 14 Tahun 2015 dimana pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dinyatakan menang jika memperoleh suara lebih banyak dibandingkan kotak kosong. Namun apabila suara kotak kosong lebih

banyak dibanding kandidat pasangan calon kepala daerah maka akan diadakan pilkada ulang di tahun mendatang yang mengikut pada pilkada serentak berikutnya.

Pelaksanaan tahapan persiapan dan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2018 secara umum dapat dikatakan lancar, namun dinamika politik yang berkembang dengan usaha dari beberapa pihak yang melakukan uji materi Undang-Undang No. 8 tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi membuat konstalasi politik di daerah mengarah semakin tajam setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015.

Secara umum putusan MK tersebut menyediakan ruang untuk terwujudnya gagasan-gagasan strategi politik yang baru dan lebih agresif dari setiap kontestan. Seperti misalnya, kandidat kontestan pemilu dapat melakukan konsolidasi politik dengan mengumpulkan seluruh partai politik yang memiliki hak mengusung dan mendaftarkan pasangan calon 17 peserta pemilu sehingga dapat meminimalisir munculnya kompetitor lain. Namun di sisi yang lain, putusan MK tersebut juga dapat mengeliminasi perilaku politik yang kontraproduktif seperti melakukan konsolidasi politik hingga terjadi pengkubuan yang tajam dan berujung pada proses penundaan pemilu karena keengganan untuk berkompetisi dengan calon petahana. Keengganan tersebut biasanya muncul karena muncul kecurigaan bahwa calon petahana akan bertindak curang dengan

memanfaatkan posisinya sebagai petahana.

Dampak dari penundaan pemilu sendiri tidak hanya sebatas administrasi saja, namun secara politik, sosial, ekonomi dan budaya akan meluas jika ditinjau dari berbagai sudut pandang. Misal dari aspek pemerintahan, dalam pelaksanaan roda pemerintahan dengan berbagai program pembangunan strategis yang memiliki jangka waktu lebih dari satu periode anggaran, tanpa kepemimpinan daerah yang definitif dapat diperkirakan akan timbul berbagai kesulitan dari hal-hal yang terkait administrasi dan birokrasinya.

2.6 Kerangka Pemikiran

Pemilihan Kepala daerah pada tahun 2020 yang diselenggarakan secara serentak memiliki warna dalam prosesnya, termasuk di Kabupaten Gowa. Pasangan petahana Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf menjadi pasangan calon tunggal melawan kotak kosong di Pilkada Gowa 2020. Adnan yang merupakan anak dari almarhum mantan Bupati Gowa dua periode, IYL yang tak lain adik kandung Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Pasangan ini diusung Sembilan partai politik yakni Partai PDI-P, PKB, Partai Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PAN, Demokrat dan Perindo. Perolehan Suara Adnan-Kio perlu diapresiasi karena dalam pilkada partisipasi pemilih tertinggi di Kabupaten Gowa. Hal itu menjadi sejarah dalam pilkada Gowa meskipun dengan kondisi Pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia tanpa terkecuali termasuk Indonesia. Selain itu hasil yang diperoleh pada pilkada mampu memecahkan rekor dukungan

tertinggi sepanjang pilkada di Sulawesi Selatan. Pasangan Adnan-Kio berhasil mengungguli kotak kosong dengan perolehan 377.463 suara atau sekitar 90,7%. Sementara kotak kosong hanya meraih 36.325 suara atau sekitar 9,3%.²³

Namun menarik jika kita melihat alasan mengapa pada Pilkada Gowa tahun 2020 hanya terdapat calon tunggal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi diantaranya *Pertama*, Tingkat elektabilitas yang tinggi dari pasangan Adnan-Kio. Tingkat elektabilitas ini dikeluarkan oleh lembaga Jaringan Survei Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia. Menunjukkan elektabilitas pasangan Adnan diatas 80%. *Kedua*, tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi pada pemerintahan Adnan-Kio di periode pertama sehingga tingkat penerimaan masyarakat terhadap pasangan ini juga tinggi. Ketiga, resiko yang diambil oleh calon lain atau penantang pasangan Adnan-Kio. Dimana resiko ini meliputi peluang besar Adnan-Kio menang, kondisi keuangan, dan juga hubungan dengan pasangan Adnan-Kio. Walau hanya melawan kolom kosong. Calon tunggal tetap harus merencanakan strategi dalam meraih kemenangan di Pilkada. Begitupun yang harus dilakukan oleh pasangan Adnan-Kio di Pilkada Gowa. Sebab, Fenomena kotak kosong dalam pilkada tidak semuanya kemudian dimenangkan oleh kandidat dimana pada Pilkada Kota Makassar tahun 2018 yang justru dimenangkan oleh

²³ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 1111/PL.02.6-Kpt/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2020.

kotak kosong. Pilkada diikuti calon tunggal yakni pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi (appi-cicu). Barulah pada Pilkada serentak 2018, kotak kosong menang melawan pasangan calon tunggal.

Beberapa strategi yang dilakukan oleh pasangan Adnan-Kio ialah *pertama*, turun langsung menemui masyarakat atau blusukan. *Kedua*, mendekati tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dan *Ketiga*, memanfaatkan media dalam kampanye. Dari ketiga strategi tersebut, strategi bertemu langsung dengan masyarakat memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kemenangan Adnan-Kio. Strategi politik adalah ilmu tentang teknik, taktik, cara, kiat yang dikelola oleh politisi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan, merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai yang diinginkan.

2.7 Skema Kerangka Pemikiran

